

Laporan Penelitian Kompetitif Individual

**INTERRELASI EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK DALAM
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI INGGRIS**



Diajukan Kepada LPPM
(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
IAIN Purwokerto Anggaran DIPA Tahun 2015

**Oleh:
Ahmad Dahlan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	:	Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP	:	19731014 2003 12 1 002
Judul Penelitian	:	Interrelasi Ekonomi, Sosial, Dan Politik Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Inggris
Biaya Anggaran	:	DIPA IAIN Purwokerto Tahun Anggaran 2015
Jumlah Anggaran	:	Rp. 1.500.000,-

Purwokerto, 9 Oktober 2015

Ketua LPPM

Peneliti

Drs. Amat Nuri, M.Pd.
NIP.

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 2003 12 1 002

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Signifikansi.....	5
D. Telaah Pustaka/Review Penelitian Terdahulu.....	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
Bab II Interrelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	14
A. Teori-teori Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	14
B. Dasar-dasar Riset Sosial	32
Bab III Dimensi Sosial, Politik, dan Ekonomi dalam Perkembangan LKS	
Di Inggris	35
A. Dimensi Sosial Politik Islam di Inggris	35
1. Sejarah Islam Masuk di Inggris.....	35
2. Dukungan Politik dalam Perkembangan Islam di Inggris.....	36
3. Islam Menjadi Peradaban di Inggris	39
B. Perkembangan Masyarakat Muslim di Beberapa Kota di Inggris.....	42
C. Perkembangan Islam di Inggris dalam Sosial Budaya	46
D. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Inggris	54
Bab IV Penutup	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka	

BAB II

INTERRALASI EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK

A. Teori-teori Ekonomi, Sosial, dan Politik

1. Pengertian Ekonomi

Istilah ekonomi berasal kata *oikos* atau *oikonomia* (bahasa Yunani) yang berarti *manajemen urusan rumah tangga*.¹ George Riesman,² menjelaskan abad 19 ekonomi hanya bertipikal pada ilmu tentang kekayaan yang dapat dipertukarkan (*exchangeable*). Kemudian abad 20, ekonomi berkembang tentang kelangkaan sumberdaya yang semakin terbatas. Atas dasar itu Riesman mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai *a science that studies the production of wealth under a system of division of labour*.³

TIM P3EI Universitas Islam Indonesia merumuskan ekonomi sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumberdaya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu perilaku manusia terkait konsumsi, produksi, serta distribusi.⁴

Era 1970an terutama setelah perbankan Islam berkembang di berbagai negara berimplikasi pada perkembangan dalam pengertian ilmu ekonomi yang bersifat konvensional dan ilmu ekonomi yang bersifat Islam. Terminologi ekonomi yang

¹ Komarudin Sastradipoera, *Uang: Di Negara Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 4. Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 366.

² George Gerald Reisman (l. 1937) merupakan ahli ekonomi dan profesor emeritus pada Pepperdine University, Amerika. Ia memimpin The Thomas Jefferson School of Philosophy, Economics, and Psychology.

³ George Riesman, *Capitalisme a Treatise of Economics* (Ottawa, Illinois: Jamason Books, 1990), hlm. 15.

⁴ TIM P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-12 (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), hlm. 14.

dikotomistik antara Islam dan konvensional juga dilatarbelakangi oleh metode pemahaman tentang ekonomi yang bersifat ekonomi positif dan ekonomi normatif.

Ekonomi positif membahas mengenai realitas hubungan ekonomi atau sesuatu yang senyatanya terjadi (*empirik*), sedangkan ekonomi normatif membahas mengenai apa yang seharusnya terjadi yang didasarkan atas nilai (*value*) atau norma (*norm*) tertentu secara eksplisit ataupun implisit.⁵

Ilmu ekonomi Islam melakukan gugatan terhadap ilmu ekonomi konvensional yang secara tegas memisahkan antara aspek positif dan aspek normatif yang berimplikasi pada fakta ekonomi merupakan sesuatu yang independen terhadap norma, tidak ada kausalitas antara norma dan fakta sehingga bersifat obyektif dan berlaku universal.⁶

Sebagaimana definisi ekonomi konvensional, definisi ekonomi Islam dalam perkembangannya juga sangat beragam.

Secara umum, etimologi ekonomi Islam sering dikaitkan dengan kalimat dalam bahasa Arab yaitu *al-iqtisāḍ al-Islāmī* (الإقتصاد الإسلامي). *Iqtisāḍ* berarti seimbang dan keadilan (التوسط والإعتدال).⁷

Kata *al-iqtisāḍ al-Islāmī* yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang berbagai aktifitas yang sesuai Islam, termaktub seperti as}-S{adr⁸ dalam menulis

⁵*Ibid.*, hlm. 23-24.

⁶*Ibid.*

⁷ Seperti dalam QS Faḥḥir (35):32.... قَمِئْتُهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْذِنُ اللَّهُ...

Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang seimbang dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah,

⁸Muhammad Baqir as}-S{adr (l. 1935) di Bagdad. Ia dari keluarga intelektual syi'ah dan menjadi pemikir ekonomi Islam sangat masyhur di era modern, terutama setelah buku *Iqtisāḍ al-dunā* sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terj.: Suherman Rosyidi (Jakarta; Rajawali Press, 2010), hlm. 131-153.

buku besarnya *Iqtis}a>duna>*,⁹ atau Najma>n Ya>sin yang menulis *Tat}ur al-Aud}a>'i al-Iqtis}a>diyah fi> As}r ar-Risa>lah wa ar-Ra>syidi>n*,¹⁰ atau al-Lih}ya>nidalam menulis *Maba>di'u al-Iqtis}a>d al-Isla>mi>*.¹¹

M. Abdul Mannan¹² secara induktif memberikan definisi ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam.¹³

Penggabungan analisis deduktif-induktif dalam pengertian ilmu ekonomi Islam dijelaskan oleh Syed Nawab Husein Naqvi,¹⁴ yang menegaskan ide sentral ilmu ekonomi Islam dan yang menempatkannya berbeda dengan ilmu ekonomi positif adalah nilai-nilai etik/agama secara eksplisit dimasukkan dalam *frame work* analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam merupakan upaya validitas ide filosofis (normatif/deduktif) yang diaplikasikan dan dipadukan dengan klaim validitas obyektif (empiris/induktif).¹⁵

⁹Muh}ammad Baqr as}-S{adr, *Iqtis}a>duna>* (Beirut: Da>r at-Ta'a>ruf Lilmat}bu>'a>t, 1401 H/1981 M). Buku setebal 783 halaman ini telah menjadi rujukan berbagai literatur ekonomi Islam.

¹⁰Najman Yasin, *Tat}u>r al-Aud}a>'i al-Iqtis}a>diyah fi As}r ar-Risa>lah wa ar-Ra>syidi>n* (ttp.: Bait al-Mausul, 1988). Buku ini membagi atas bagian (*fas}l*) perkembangan ekonomi Islam masa kenabian sampai Khulafa>'u ar-Ra>syidi>n. Di antara bagian menarik dari buku ini adalah penjelasan tentang sistem ekonomi (الأوضاع الاقتصادية) di jazirah 'Arab sebelum Islam, terutama pada suku Baduwi dalam bercocok tanam (الزراعة).

¹¹Sa'ad bin H{amdan al-Lih}ya>ni>, *Maba>di'u al-Iqtis}a>d al-Isla>mi>* (ttp.: tnp., 1428 H), hlm. 10.

¹²M. Abdul Mannan (l. 1938) di Bangladesh. Ia memperoleh gelar doktor pada Michigan State University Amerika Serikat pada tahun 1973. Karyanya yang berjudul *Islamic Economics: Theory and Practice* (1980) sangat monumental dan menjadi rujukan utama setiap tulisan tentang ekonomi Islam. Haneef, *Pemikiran*, hlm. 15-36.

¹³M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.

¹⁴Syed Nawab Haedar Naqvi (l. 1935) di Pakistan. Ia memperoleh gelar doktor pada Universitas Princeton Amerika Serikat tahun 1966. Karya monumentalnya adalah *Ethics adn Economics: An Islamic Synthesis* (UK: The Islamic Foundation, 1981). Biografi lengkap Mannan, lihat Mohammed Aslam Haneef, "Syed Nawab Haedar Naqvi", dalam *Pemikiran*, hlm. 63-85.

¹⁵Syed Nawab Haedar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuql Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 19.

Dari beberapa pengertian ekonomi Islam di atas, dapat dijelaskan bahwa kajian dan pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam.

Adapun kepentingan atau tujuan dari sistem ekonomi Islam merupakan bentuk usaha pengembangan sistem atau hukum Islam atau bisa disebut *ijtiha>d*,¹⁶ terhadap ajaran agama (*maqas>sid asy-syari>'ah*),¹⁷ pada wilayah normatif sehingga dapat dipraktikkan menjadi sistem yang aplikatif pada wilayah sosial (empiris).

Fahim Khan menjelaskan secara komprehensif kelima unsur *maqas>sid asy-syari>'ah* tersebut diperlukan manusia untuk merealisasikan kebahagiaan (*falah*) dan kehidupan baik (*hayyatan t}ayyibatan*) dalam batas-batas yang telah ditentukan syari'at.¹⁸

2. Pengertian Politik

Politik berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani) berarti kota. Orang yang mendiami *polis* sebagai *pilites* atau warga negara, *politikos* (kewarganegaraan), *politike techne* (kemahiran politik), *ars politica* (kemahiran tentang kenegaraan), *politike episteme* (ilmu politik).¹⁹

¹⁶*Ijtiha>d* berasal dari kata *jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Terjadi perbedaan terminologis *ijtiha>d* sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Bagi ulama yang menggunakan pendekatan holistik dan integral, *ijtiha>d* diartikan sebagai “segala upaya yang dicurahkan mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, seperti fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Adapun ulama *us}u>l al-fiqh* melihat *ijtiha>d* sebagai aktifitas nalar yang berkaitan dengan masalah fiqih. Abdul Aziz Dahlan, et.el., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-7 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), Jilid 2, hlm. 669.

¹⁷*Maqas>sid as-syari>'ah* dipopulerkan oleh asy-Sya>t}ibi> yaitu memelihara agama (حفظ الدين), kehidupan (حفظ النفس), pengetahuan (حفظ العقل), keturunan (حفظ النسل), dan harta benda (حفظ المال). Segala yang menyangkut lima hal tersebut (atau salah satunya) merupakan *mas}lah}ahdan* segala sesuatu yang merusak kelima atau salah satunya merupakan *mafsadah*. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syathibi* (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), hlm. 71. Mustak Ahmad, *Etika Bisnis*, terj.: Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 106.

¹⁸M. Fahim Khan, “Theory of Consumer Behaviour an Islamic Perspective”, dalam Sayed Taher (ed.), *Reading in Micro Economics* (Longman, Malaysia: Petaling Jaya, 1992), hlm. 73-74.

¹⁹Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 89-90.

Aristoteles (384-322 SM.) merupakan pemikir awal yang memperkenalkan kata *politik* dalam pengamatannya yang sangat terkenal bahwa “manusia pada dasarnya adalah binatang politik”.²⁰ Aristoteles juga mengatakan ilmu politik tidak menciptakan manusia tapi memanfaatkan manusia.²¹ Artinya dalam setiap kehidupan maka manusia akan terlibat dalam berpolitik.

Keller,²² menjelaskan pada saat Aristoteles menulis *Politika*, situasi sedang terjadi penurunan kualitas negara kota kuno. Atas hal tersebut, *politik* yang digagas Aristoteles bertujuan untuk menemukan konstitusi kota Yunani yang sesuai dengan kondisi historis, sosial dan moral yang berbeda-beda.²³

Dalam perkembangan, banyak beragam pengertian politik. Laswell menjelaskan politik sebagai *who gets what, when, how* (siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana).²⁴ Ramlan Surbakti menjelaskan “mendapatkan apa” artinya mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. “Bagaimana” berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.²⁵

IAIN PURWOKERTO

²⁰ Aristoteles, *Politik (La Politica)*, terj.: Syamsul Irawan Kharie (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 7. *La Politica* karya Aristoteles diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett. Lihat Clarton Clymer Rodee, et.al., *Pengantar Ilmu Politik*, terj. Zulkifli Hamid, Cet. Ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 2.

²¹ Aristoteles, *Politik*, hlm. 29.

²² Suzanne Keller (1927-2010) merupakan sosiolog serta wanita pertama yang menduduki posisi pada fakultas di Princeton University. Ia meninggal 9 Desember 2010 pada usia 83. *New Jersey (online)*, “Suzanne Keller, first tenured female professor at Princeton University, dies at 83”, 10 Desember 2010, (<http://www.nj.com/news/times/regional/index.ssf?/base/news-21.ml&coll=5>).

²³ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Penentu Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*, terj. Zahara D. Noer, Cet. Ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 3.

²⁴ Harold Lasswell, *Politics, Who gets What, When, How* (New York: World Publishing, 1950), hlm. 128. Supardan, *Pengantar*, hlm. 494.

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 9.

Pengertian politik yang sudah menjelaskan arti kekuasaan dan kebijakan ditulis oleh Morgenthau,²⁶ yang menjelaskan politik sebagai pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan (*struggle for power*),²⁷ serta David Easton,²⁸ yang mengartikan politik sebagai *study of the making of public policy*,²⁹ atau semua aktifitas yang mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan dilaksanakan.³⁰

Dari beberapa definisi di atas, maka politik merupakan kegiatan warga negara (Aristoteles) untuk mendapatkan nilai-nilai (Laswell) melalui pertarungan kekuasaan (Morgenthau) dalam bentuk kebijakan (Easton).

Miriam Budiardjo,³¹ menjelaskan politik merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya dalam bentuk kebijaksanaan umum (*public policies*).³²

²⁶Hans Joachim Morgenthau (1904-1980) merupakan pemimpin era awal dalam studi politik Internasional pada abad 20.

²⁷Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred A. Knopf, 1961), hlm. 27 dan 39.

²⁸David Easton (lahir 1917) merupakan ahli ilmu politik dari Kanada. Ia datang ke Amerika Serikat tahun 1943 dan menjadi Profesor peneliti pada Fakultas Ilmu Politik, Universitas California. Ia juga pernah menjadi presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika.

²⁹ David Easton, *The Political System* (New York: Alfred A. Knopf, 1971), hlm. 128. Supardan, *Pengantar*, hlm. 494.

³⁰Caporaso dan Levine, *Teori-teori*, hlm. 3-4. Deliarnov, *Ekonomi Politik* (Surabaya: Erlangga, 2006), hlm. 6. Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi*, hlm. 90.

³¹ Miriam Budiardjo (1923-2007) istri Ali Budiardjo (tokoh perjuangan Indonesia) adalah pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) periode 1974-1979.

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 8. Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14. Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi*, hlm. 90.

Ramlan Surbakti,³³ mengklasifikasikan minimal terdapat 5 pandangan tentang politik; 1)Proyeksi warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, 2)Aktifitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan, 3)Aktifitas untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, 4) Aktifitas tentang pelaksanaan kebijaksanaan, serta 5)politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.³⁴

Klasifikasi satu sampai empat merupakan ranah politik murni dalam arti kekuasaan, perebutan kekuasaan, serta kebijakan negara.Sedangkan klasifikasi kelima dapat diartikan sebagai politik yang masih bersifat umum.

Ilmuan politik sejak lama mengkonsepsikan kekuasaan sebagai “distribusi penguasaan kekuasaan”. Tetapi, politik termasuk di dunia muslim tidak semata membahas otoritas pemaksa kepatuhan yang mapan. Politik juga berkenaan dengan tawar menawar di antara banyak kekuatan atau kelompok-kelompok yang bersaing, bahkan sering terjadi dengan paksaan (kudeta).³⁵

Dalam konteks definisi ilmu politik yang komprehensif ditulis oleh Soltau.³⁶Ia menulis;

³³Ramlan Surbakti (l. 1951) meraih gelar Ph.D. dari Departemen Ilmu Politik, Illinois University, Amerika Serikat (1983-1991).Ia menjadi dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.

³⁴ Surbakti, *Memahami*, hlm. 2-11. Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi*, hlm. 90.

³⁵ F. Dale Eickelam, et.el.,*Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, terj.: Endi Haryono dan Rahmi Yunita(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 6. Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred A. Knopf, 1961), hlm. 27 dan 39.

³⁶Roger Henry Soltau (1887-1953), bangsawan kaya di Perancis. Karya-karya Soltau cukup banyak dan populer hingga ke Inggris dan Kanada, diantaranya: *The Duke de Choiseul; the Lothian essay* (dicetak oleh Oxford Blackwell pada 1908 dan 1909).

*Political sciences is the study of state, it's aims and purposes... the institutions by which these are going to be realized, its relations with individual members, and other states.*³⁷

Dapat diartikan, ilmu politik merupakan studi tentang negara, tujuan-tujuannya, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, yang berhubungan antara negara dengan warga negaranya, dan (negara) dengan negara lain.

Politik dalam ranah keilmuan Islam disebut *as-siya>sah*. Ibn Qayyim al-Jauziyah menulis:

السياسة ما كان فعلا يكون منه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يكن بشرعه الرسول ولا نزل به وحي.³⁸

Siya>sah atau politik dalam Islam merupakan segala aktifitas manusia untuk menciptakan kedamaian dan menjauhkan dari pertikaian dan kerusakan. Walaupun metode dan aturan aktifitas politik tersebut, Rasulullah Saw. ataupun wahyu Allah Swt. tidak menjelaskan secara eksplisit. Artinya aktifitas dalam *siya>sah Isla>miyah* sangat terbuka peluang bagi masyarakat untuk berijtihad.

Definisi operasional politik dalam perkembangannya juga beridometik dengan disiplin ilmu sosial lainnya yang melahirkan ragam definisi tentang politik.

Mahfud MD dalam disertasinya menggunakan istilah “Politik Hukum” yang bermakna sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia, yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum

³⁷Roger F. Soltan, *An Introduction to Politics* (London: Longmans, 1961), hlm. 4. Supardan, *Pengantar Ilmu*, hlm. 492.

³⁸ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'la>m al-Muwa>qi'i>n 'an Rabb al-'A<lami>n* (Beirut: Da>r al-Jael, tt.), hlm. 16.

yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.³⁹

Michael Rush dan Philip Althoff menulis tentang “sosiologi politik” yang dimaknai sebagai *subject area* (bidang politik), beberapa orang menamakannya sebagai disiplin, yang mempelajari mata-rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik.⁴⁰

3. Struktur dan Sistem Politik

Dalam struktur politik terdapat suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur disebut juga *the ruler* atau penguasa, yang terdiri dari atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur atau *the ruled* adalah masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Seperti partai politik/organisasi politik, ormas, pers, kelompok kepentingan, LSM, dan *informal leader*.⁴¹

Struktur politik merupakan dampak dari pengertian politik yang lebih fokus dan dipersempit. Hal ini terjadi sejak abad ke-16 ketika istilah “ilmu politik (*science politique*)” dikenalkan oleh Jean Bodin,⁴² dipertegas oleh Montesquieu⁴³ yang

³⁹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 17. Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional”, *makalah* pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

⁴⁰Michael Rush dan Philip Althoff, *Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono, cet. Ke-15 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 22.

⁴¹Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi*, hlm. 105.

⁴²Jean Bodin (1530-1596) adalah pakar filsafat politik dari Prancis, anggota dari parlemen di Paris, dan profesor hukum di Toulouse.

⁴³Baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) merupakan pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan (*Enlightenment*). Teorinya tentang pemisahan kekuasaan sangat populer dan diterapkan pada banyak konstitusi negara. Biografi Montesquieu lihat Ahmad Suhelmi, *Sejarah Pemikiran Barat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 215-222.

mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan (politik) dapat dimasukkan dalam kategori legislatif, eksekutif, dan yudikatif (*trias politica*).⁴⁴

Legislatif, eksekutif, dan yudikatif kemudian dikenal dengan Tiga Pilar Suprastruktur Politik, yang satu sama lain terpisah.⁴⁵ Penggabungan tiga pilar struktur suprastruktur hanya memberikan penguasa negara dengan pengelolaan semena-mena (otoriter), dan hakim akan menjadi bagian pembuat undang-undang yang dapat menimbulkan ketidakadilan bersama.

Dari struktur politik yang berbasis pada suprastruktur (*the ruler*) maka ekonomi politik tidak hadir di dalamnya. Karena inilah yang disebut dengan politik murni. Tapi jika struktur politik dilihat dari aspek infrastruktur dan dipadukan dengan sistem politik yang berkembang di sebuah negara, maka peluang terjadinya ekonomi politik hampir pasti terjadi.

4. Pengertian dan Perkembangan Ekonomi Politik

Ekonomi politik mulai berkembang sejak abad ke-14, saat terjadi transisi dari kekuasaan raja kepada kaum saudagar (era *merkantilisme*).⁴⁶ Praktik para saudagar (*merchant*) yang sangat merugikan petani tersebut tidak disukai oleh Quesnay,⁴⁷ yang kemudian mencetuskan faham *fisiokratisme*.⁴⁸

⁴⁴ Rodee, et.al., *Pengantar*, hlm.3.

⁴⁵ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 145.

⁴⁶ Istilah *merkantilisme* berasal dari *merchant* (pedagang). Faham *merkantilisme* berarti setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Dalam *merkantilisme* kebijakan yang ditekankan adalah hasil dari surplus *ekspor* akan menjadi sumber kekuasaan. Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Ed. Ke-5 (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 19-20.

⁴⁷ Francis Quesnay (1694-1774) adalah anggota "Academie des Sciences", lembaga ilmiah sangat berwibawa di Prancis. Quesnay membagi masyarakat dalam 4 golongan. (1) masyarakat produktif, aktif mengolah tanah. (2) tuan tanah. (3) masyarakat tidak produktif (steril), saudagar dan pengrajin. (4) masyarakat buruh. Adapun tanah merupakan satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat. Deliarnov, *Perkembangan*, hlm. 23-24.

⁴⁸ Deliarnov, *Ekonomi*, hlm. 1.

Kaum fisiokrat yang melahirkan faham *fisiokratisme* (*physic=alam, cratos=kekuasaan*) menganggap bahwa sumber kekayaan adalah sumber daya alam. Alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan yang bersifat *kosmopolit* (kapan pun, di mana pun, dalam situasi apa pun).⁴⁹

Dalam sumber yang lain ditulis istilah ekonomi politik pertama kali digunakan pada abad 16 oleh Antony Montchretien⁵⁰ dalam *Trate de, L economic Politique* (*Treatise on Political Economy*). Kemudian James Steuart (1712-1780)⁵¹ pada tahun 1615 menulis *In enquiry into the Principles of Political Economy*.⁵²

Menurut Yustika dan Deliarnov istilah ekonomi politik menjadi sangat populer terutama pada abad 18, saat Adam Smith⁵³ menulis *The Wealth of Nations* tahun 1776.⁵⁴

Adam Smith menulis:

Political economy, considered as a branch of the science of a statesman or legislator, proposes two distinct objects; first, to provide a plentiful revenue or subsistence for the people, or, more properly, to enable them to provide such a revenue or subsistence for themselves; and, secondly, to supply the

⁴⁹ Deliarnov, *Perkembangan*, hlm. 23.

⁵⁰ Antony Montchretien (1575-1621) adalah tentara Prancis sekaligus penulis dan ahli ekonomi. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, buku *Trate de, L economic Politique* (*Treatise on Political Economy*) merupakan tulisan pertama yang menulis judul "political economy".

⁵¹ Sir James Stewart Denham (1712-1780) merupakan ahli ilmu ekonomi politik, anak dari Sir James Stewart.

⁵² Buku *An Inquiry into the Principles of Political Economy* ditulis pada tahun 1615 dapat dikatakan sebagai risalah pertama yang sistematis tentang ilmu ekonomi. Isi buku dibagi dalam lima bab, Buku Satu tentang Population and Agriculture, Buku Dua tentang Trade and Industry, Buku Tiga tentang Money and Coin, serta Buku Empat tentang Credits and Debts, serta Buku Lima tentang Taxes, and of the Proper Application of their Amount.

⁵³ Adam Smith (1723-1770) adalah tokoh ekonomi modern kelahiran Skotlandia. Ia adalah petelak dasar-dasar rasionalisasi ekonomi sehingga lahir faham rasionalisme atau liberalisme. George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 52-63.

⁵⁴ Yustika, *Ekonomi*, hlm. 3. Deliarnov, *Ekonomi*, hlm. 24. Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi*, hlm. 144.

*state or commonwealth with a revenue sufficient for the public services. It proposes to enrich both the people and the sovereign.*⁵⁵

Dari definisi di atas, ekonomi politik dapat diartikan sebagai cabang ilmu tentang negarawan atau legislator yang memiliki dua tujuan berbeda. *Pertama*, untuk menyediakan pendapatan yang melimpah, atau pendapatan masyarakat, atau untuk menyediakan banyak pendapatan atau nafkah untuk kehidupan mereka. *Kedua*, untuk menyediakan berbagai sumberdaya pendapatan negara atau *commonwealth* untuk pelayanan publik. Ekonomi politik menjelaskan untuk memakmurkan masyarakat dan pemerintah/penguasa.

Pada abad 19, ekonomi politik mulai terpisahkan secara independen setelah keluar tulisan *Principles of Economics*⁵⁶ karya Alfred Marshall.⁵⁷ Dijelaskan bahwa ekonomi berdiri sendiri sebagai suatu yang lebih matematis kuantitatif, dan politik juga berdiri sendiri sebagai sesuatu yang bersifat kekuasaan dan kenegaraan.⁵⁸ Dalam buku *Principles of Economics* yang terdiri dalam 6 bab, Marshall secara detail menjelaskan tentang ilmu ekonomi sebagai kegiatan atau aktifitas perspektif gejala ekonomi murni, walaupun sekilas Marshall masih menjelaskan ekonomi dalam konteks kewajiban negara dalam mendistribusikan pendapatan, yaitu pada bagian terakhir.

Ng. Philipus (Dosen STIE IBII Jakarta) dan Nurul Aini (alumnus S3 UI dan dosen tetap Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta) menjelaskan istilah ekonomi politik

⁵⁵ Adam Smith, "Systems Of Political Economy", *The Wealth of Nations* (Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University, 2005), Book IV, hlm. 341.

⁵⁶ Buku *Principles of Economics* yang ditulis pada tahun 1890 dibagi dalam 6 bab. Bab Pertama tentang Preliminary Survey, Bab Kedua tentang Some Fundamental Nations, Bab Ketiga tentang on Want and Their Satisfaction, Bab Keempat tentang the Agent of Production, Land, Labour, Capital, and Organization, Bab Kelima tentang General Relations of Supply, Demand, and Value, Bab Keenam tentang Distribution of Nations Income.

⁵⁷ Alfred Marshall (1842-1924) merupakan ahli ekonomi Inggris yang paling berpengaruh di zamannya. Ia profesor dalam bidang ekonomi politik pada Universitas Cambridge.

⁵⁸ Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi*, hlm. 144.

berkembang kembali pada abad 20, terutama setelah Robert Dahl,⁵⁹ dan Charles Lindblom,⁶⁰ yang pada tahun 1953 menulis “*Politics, Economics and Welfare*” yang menjelaskan keterkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yang saling berkaitan.⁶¹

Dari beberapa rangkaian penjelasan di atas, ekonomi politik secara historis telah berkembang sejak abad 14 sampai 16, yang kemudian diformalkan oleh mahaguru ekonomi Adam Smith pada abad 18. Abad 19, ekonomi politik terpisahkan kembali oleh Marshall dan kembali populer sebagai suatu kajian akademik pada abad ke 20 oleh Robert Dahl dan Charles Lindblom.

Menurut Rachbini, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (*cross fertilization*) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.⁶²

Jevons (1835-1882), Profesor ekonomi Universitas Cardiff Wales, dalam *The Theory of Political Economy*,⁶³ menulis ekonomi politik dalam keadaan kacausaat ini, karena dalam ekonomi politik terdapat kebutuhan dari pengelompokan bagian-bagian pengetahuan yang sangat luas.⁶⁴

IAIN PURWOKERTO

⁵⁹Robert Alan Dahl (lahir di Inwood, 1915) merupakan Profesor emeritus bidang ilmu politik pada Yale University. Ia pernah menjadi presiden American Political Science Association.

⁶⁰Charles Edward Lindblom (lahir 1917) merupakan Profesor Emeritus bidang ilmu politik dan ilmu ekonomi pada Yale University. Ia pernah menjadi Direktur pada Yale’s Institution for Social and Policy Studies.

⁶¹ Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi*, hlm. 145.

⁶² Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Grassindo, 2001), hlm. 2-3.

⁶³ Buku *The Theory of Political Economy* pertama kali ditulis pada tahun 1871. Materi buku dijelaskan dalam 8 bab, Bab pertama, Introduction, Bab kedua tentang Theory of Pleasure and Pain, Bab ketiga tentang Theory of Utility, Bab keempat tentang Theory of Exchange, Bab Kelima tentang Theory of Labour, Bab Keenam tentang Theory of Rent, Bab ketujuh tentang Theory of Capital, serta Bab Kedelapan penutup (Concluding Remarks).

⁶⁴ William Stanley Jevons, *The Theory of Political Economy*, edisi ke-6, (London and New York: Macmillan and Co., 1871), hlm. 20.

Pendapat Jevons tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Rachbini tampak berkaitan. Menurut Rachbini, ilmu ekonomi politik selalu mengalami transformasi dan sangat dinamis secara teoritis, atau disebut “problem instrumen” yang tidak pernah tuntas. Pada masa tertentu, kajian lebih tertuju pada aspek-aspek politik dan kebijakan pemerintah, tetapi pada masa lain kadang kajian yang sama lebih tertuju pada kajian ekonomi.⁶⁵ Inilah yang barangkali bahasa Jevons adalah “kekacauan”.

Caporaso dan Levin menjelaskan perkembangan studi ekonomi politik berdampak pada ilmu ekonomi murni mengalami eskalatif terhadap ilmu politik.⁶⁶

Deliarnov menjelaskan dalam kajian ekonomi politik, variabel atau instrumen ekonomi tetap menjadi suatu yang utama, tapi dibutuhkan keterkaitan atau penyelidikan terhadap aktor yang terlibat dalam gerakan variabel atau parameter tersebut serta tidak lupa mengkaji struktur sosial dan politik yang menghubungkan satu aktor dengan yang lainnya.⁶⁷ Atas penjelasan Deliarnov tersebut, dalam disertasi ini kajian tentang yang terkait regulasi perbankan syariah menjadi variabel utama, sedangkan aktor lain seperti peran pemerintah dan masyarakat menjadi variabel yang terintegrasi dalam pembahasan ekonomi politik perbankan syariah.

Sudiby, ⁶⁸ dalam penelitiannya tentang ekonomi politik media penyiaran menjelaskan ekonomi politik berkembang sebagai respons terhadap akselerasi kapitalisme. Berkembang beberapa varian, seperti *ekonomi politik kritis*, yaitu studi

⁶⁵ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 3.

⁶⁶ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Theories of Political Economy* (USA: Cambridge University Press, 1992), hlm. 23.

⁶⁷ Deliarnov, *Ekonomi*, hlm. 9-10. Mengutip pendapat Dorodjatun Kuntjoro Jakti, “Pendekatan Ekonomi Politik (*Political Economy*): Jembatan di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik” dalam *Jurnal Politik*, No. 8, 1991, hlm. 3-12.

⁶⁸ Agus Sudiby, lahir di Malang 8 Juni 1974. Alumni Ilmu Komunikasi UGM (1998). Sejak 1999 menjadi peneliti di *Media Wacah* ISAI Jakarta. Beberapa karyanya, *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2002), *Neraca Gus Dur* (Jakarta: Lakspedam NU, 2002).

ekonomi-politik yang kritis terhadap proses-proses liberalisasi, dengan mengedepankan aspek-aspek moral dan etika sosial. Terdapat juga *ekonomi politik liberal* yang cenderung memberikan afirmasi terhadap proses dan dampak liberalisasi.⁶⁹

Sudibyo menjelaskan kritik utama dalam ekonomi politik ditujukan pada kecenderungan determinisme ekonomi, yang melihat faktor-faktor ekonomi sebagai satu-satunya faktor yang menentukan dinamika masyarakat modern, dan mengabaikan agen-agen sosial, negara, pasar, dan masyarakat.⁷⁰

Yustika, Profesor bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, menjelaskan perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given*.⁷¹

Dari beberapa definisi di atas jika dikaitkan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia maka ekonomi politik perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai studi tentang perbankan syariah di Indonesia dilihat dari aspek regulasi dan kebijakan tentang perbankan, variabel atau aktor lain yang mempengaruhi atau terkait dengan kebijakan tersebut, serta respon publik terhadap kebijakan perbankan syariah. Publik yang dimaksud dapat berarti individu/masyarakat sebagai konsumen atau produsen.

⁶⁹ Agus Sudibyo, *Ekonomi Politik Media Penyiaran* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 6.

⁷⁰ Sudibyo, *ibid.*, hlm. 6.

⁷¹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 2.

5. Urgensi Studi Ekonomi-Politik

Caporaso dan Levine menjelaskan istilah ekonomi politik digunakan oleh beberapa pemikir untuk menyebut hubungan pasar dengan kekuasaan. Robert Keohane,⁷² menjelaskan ketika dalam sebuah perekonomian, pelaku yang satu menerapkan kekuasaan pada pelaku yang lain, maka perekonomian itu bersifat politis.⁷³

Menurut Hudyanto,⁷⁴ kehadiran disiplin ilmu ekonomi politik sangat tepat merujuk pada perdebatan terhadap eksistensi dan metodologi ilmu ekonomi modern. Seperti pemikir mazhab historis (*historimus*) dan penggagas ekonomi kelembagaan (*institutional economics*).

Mazhab Historis (*historimus*) merupakan model pemikiran yang mengkritik kaum neo klasik yang hanya menggunakan pendekatan deduktif (*reasoning from general to the particular*). Seperti dalil atau teori permintaan yang bersifat umum, jumlah yang diminta tergantung harga barang. Kemudian disimpulkan, konsumsi kopi, gula, pakaian, dalam kasus apapun dan dimanapun hanya akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi berupa harga barang tersebut.⁷⁵

Kemudian *mazhab historismus* yang muncul di Jerman menggunakan cara berpikir induktif. Pendekatan ini menyimpulkan sesuatu berdasarkan atas pengamatan empirik atas suatu kasus pada suatu saat, pada suatu waktu (*reasoning from the particular to the general*). Dalam kenyataan empiris, konsumsi suatu barang tidak

⁷²Robert O. Keohane (lahir 1941) adalah Profesor Ilmu Politik di Woodrow Wilson School, Princeton University. Buku *After Hegemony*-nya menjadi dikaitkan dengan teori *institutionalism neo-liberal*.

⁷³Caporaso dan Levine, *Teori-teori*, hlm.390. Robert Keohane, *After Hegemony* (N.J.: Princeton University Press, 1984), hlm. 21.

⁷⁴Hudyanto (l. 1960) adalah dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan peneliti di beberapa lembaga seperti Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM (1984-1993), Yayasan Argo Ekonomika, Jakarta (1995-1996).

⁷⁵ Hudyanto, *Ekonomi Politik*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.9.

selalu tergantung pada harga barang bersangkutan melainkan oleh faktor-faktor lain.⁷⁶ Beberapa tokoh mazhab historismus adalah Friederich List,⁷⁷ serta Max Weber (1864-1920).⁷⁸

Ekonomi kelembagaan yang lahir di Amerika pada tahun 1920an dengan tokohnya Bunda Veblen⁷⁹ juga mengkritik teori ekonomi kaum klasik dan neo klasik yang cenderung matematis dan menyederhanakan fenomena ekonomi. Cara berpikir ekonomi-sentris cenderung mengabaikan aspek non-ekonomi. Padahal faktor lingkungan tempat manusia tinggal (lingkungan sosial, politik, geografi) sangat menentukan perilaku seseorang. Seperti perilaku konsumsi, tidak semata-mata karena faktor harga dan kebutuhan tapi dipengaruhi oleh kondisi sosial lingkungannya yang selalu mendorong untuk melakukan konsumsi (*demonstration effect*).⁸⁰

6. Metode dan Substansi Ekonomi Politik

Metode dan substansi ekonomi politik seringkali menjadi urgen untuk memberi deskripsi substansial antara ekonomi politik dengan politik ekonomi.

Tabel. 2.1.
Metode dan Substansi Ekonomi Politik

METODE	SUBSTANSI	
	Ekonomi	Politik
Ekonomi	(1) Teori ekonomi tradisional, perilaku	(2) Penerapan metode ekonomi

⁷⁶*Ibid.*, hlm.9. Deliarnov, *Perkembangan*, hlm.127-139.

⁷⁷Friedrich List (1789-1846) merupakan pemikir Jerman terkemuka dalam bidang ilmu ekonomi pada abad 19. Buku terbaiknya berjudul; *The National System of Political Economy* (1841) yang mengkritik paradigma Smithian tentang perdagangan bebas sebagai sesuatu yang bertentangan (*inimical*) untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Biografi Singkat List dapat diakses pada *The Online Library of Liberty*, "Friedrich List" (<http://oll.libertyfund.org>)

⁷⁸Giddens menjelaskan karya-karya Max Weber (1864-1920) sebagai studi sejarah yang terperinci, dan dari dalam konteks masalah-masalah yang khusus kemudian memperluas jangkauan tulisan-tulisannya pada suatu sifat teori umum. Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, terj.: Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 148

⁷⁹Thorstein Bunda Veblen (1857-1929) mempunyai pola berpikir, masyarakat adalah suatu kompleksitas tempat setiap orang hidup, sehingga setiap orang pun dipengaruhi dan ikut mempengaruhi pandangan serta perilaku orang lain.

⁸⁰Deliarnov, *Perkembangan*, hlm. 142.

	maksimalisasi pasar, teori harga, efisiensi alokasi	terhadap politik, pilihan publik.
Politik	(3) Penerapan metode politik terhadap ekonomi, analisa distribusi kekuasaan dalam situasi pasar	(4) Ilmu politik tradisional, analisis distribusi kekuasaan dalam bidang politik

Dari gambar di atas dapat dijelaskan ekonomi politik merupakan studi yang berbasis pada penerapan metode ekonomi terhadap politik. Sedangkan politik ekonomi merupakan studi yang berbasis pada penerapan metode politik terhadap masalah-masalah ekonomi.⁸¹ Dari kedua istilah “politik ekonomi” dan “ekonomi politik”, menurut Deliarnov “ekonomi politik” lebih sering digunakan, yang bisa digunakan mewakili “politik ekonomi” atau “ekonomi politik”.⁸²

Sejak 1950-an, telah berkembang pola-pola baru dalam studi politik, seperti *Comparative Politics*. Walaupun menurut Mayer, politik perbandingan adalah suatu metode bukan suatu bidang studi.⁸³

Menurut Albert Widjaja,⁸⁴ politik perbandingan tidak lagi membatasi diri pada pendekatan tradisional yang disebut “konfigurasi” yang hanya menekankan “ciri-ciri khas yang menonjol dari masing-masing sistem politik”, tapi lebih banyak perhatian pada pola hubungan dan interaksi antara kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial beserta akar-akarnya.⁸⁵

Dari definisi yang dikembangkan oleh Widjaja, maka studi politik tidak terbatas pada satu lingkungan sistem politik, tapi mencakup lintas-nasional atau lintas budaya.

⁸¹ Caporaso dan Levine, *Teori-teori Ekonomi Politik*, hlm. 303. Lihat juga matrik yang sama dengan beberapa modifikasi, Deliarnov, *Ekonomi Politik*, hlm. 16-17.

⁸² Deliarnov, *Ibid.*, hlm. 19.

⁸³ Lawrence C. Mayer, *Comparative Political Inquiry: A Methodological Survey* (Homewood, Illionis: The Dorsey Press, 1972), hlm. 3.

⁸⁴ Albert Widjaja (lahir 1940) adalah Staf Pengajar serta Research Associate pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

⁸⁵ Albert Widjaja, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 25-26.

Era 1970-1980an berkembang ekonomi politik baru. Stuart Sayer menyatakan ekonomi politik merupakan salah satu yang paling aktif tidak hanya dalam ilmu makro ekonomi tapi ekonomi secara umum.⁸⁶

Menurut Deliarnov, beberapa penulis istilah ekonomi politik dijadikan sebagai suatu label formal yang bisa diaplikasikan pada studi-studi yang berkaitan dengan aspek kebijakan publik. Bagi kelompok ini, studi ekonomi politik lebih sebagai tinjauan ekonomi atas berbagai kebijaksanaan publik yang dilakukan pemerintah (*economics of public policy*).⁸⁷

D. Dasar-dasar Riset Sosial

Sosial artinya masyarakat. Sedangkan ilmu yang mengkaji tentang fenomena sosial adalah sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata *socius* dan *logos*. *Socius* (Yunani) berarti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat. Sedangkan *logos* berarti ilmu atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian secara harfiah istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat.⁸⁸

Abdulsyani menjelaskan sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek studi masyarakat.⁸⁹ Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam tata kehidupan bersama. Pusat perhatiannya adalah kehidupan

⁸⁶ Stuart Sayer, "Issues in New Political Economy: An Overview", dalam *Jurnal of Economic Surveys*, Vol. 14, No. 5, 2000, hlm. 516, lihat juga A. Drazen, *Political Economy in Macroeconomics* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000), hlm. xi.

⁸⁷ Derianov, *Ekonomi*, hlm. 12.

⁸⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 1. Metta Spencer dan Inkeles Alex, *Foundations of Modern Sociology*, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1982), hlm. 4. Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm. 19.

⁸⁹ Abdulsyani, *Ibid.*, hlm. 5.

kelompok dan tingkah laku sosial. Karena yang diperhatikan adalah masalah-masalah yang sifatnya berskala besar dan substansial serta dalam konteks budaya yang lebih luas, pemahaman sosiologi pun berskala makro, mendasar dan deduktif. Pemahaman mikro dan induktif kurang menarik perhatian sosiologi.⁹⁰

Selo Seomardjan dan Sulaiman Sumantri menjelaskan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial (yaitu keseluruhan jalinan antar unsur sosial yang pokok seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial dan lapisan sosial) dan proses-proses sosial (yang berupa pengaruh timbal balik antar pelbagai kehidupan bersama seperti kehidupan ekonomi dengan kehidupan-kehidupan politik, kehidupan hukum dengan kehidupan agama, dan lain sebagainya), termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan sosial.

Max Weber mengartikan sosiologi adalah ilmu yang berusaha untuk memahami tindakan-tindakan sosial dengan berbagai unsur keagamaan dan kebudayaan.

Max Weber (1864-1920) merupakan sosiolog Jerman, yang pada tahun 1900-an telah menerbitkan studi-studi yang orisinal dan brilian tentang hubungan antara agama dan masyarakat.⁹¹ Weber adalah orang pertama yang menghubungkan Protestantisme dengan ekonomi kapitalis sehingga lahir *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Scribners, 1904-05). Weber juga dapat menulis dengan cerdas tentang orang-orang Luteran Jerman dalam satu buku dan orang-orang

⁹⁰ Mastuhu, "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi", dalam Mastuhu dan Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, (Jakarta: Pusjarlit dan Nuansa, 1998), hlm. 81-82.

⁹¹ Sejarah singkat Weber, lihat Peter Beilharz (ed.), *Teori-teori Sosial*, terj.: Sigit Jatmiko, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 363-372. Antonio Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, terj.: Soeheba Kramadibrata, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 147-226.

Konghucu Cina di buku lain. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menghubungkan fakta-fakta tertentu di dalam cara-cara yang mengarah pada konsep dan teori yang sangat abstrak. Ia juga salah seorang yang bertanggung jawab dalam memperkenalkan metode yang banyak diperdebatkan, *Verstehen* yang menekankan peran ide dan sikap manusia di dalam menjelaskan sistem sosial. Sesuai dengan hal ini adalah ide bahwa kebudayaan adalah produk “tindakan” manusia (Jerman, *Handelri*); kebudayaan ada karena manusia melakukan hal-hal yang sesuai dengan beberapa ideal, sikap, dan nilai. Akibatnya, hanya ketika kita memahami “arti” (Jerman, *Sinn*) dari suatu tindakan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka kita benar-benar dapat menangkap dan menjelaskan apa yang sedang berlangsung. Weber seringkali dituduh sebagai uraian mengenai agama secara sempit.⁹²

Pada saat ketika sedikit orang Amerika mengetahui siapa Weber, Talcott Parsons,⁹³ menerjemahkan beberapa karya Weber dan menjelaskan ide-ide pokoknya. Konsep utama Weber yang dibawa ke Amerika oleh Parsons berpengaruh dalam pendekatan interpretatif Geertz terhadap kebudayaan. Di seluruh esai-esainya yang teoretis dan bahkan beberapa dari etnografinya, tak seorang pun teoretisi sosial yang lebih sering dirujuk Geertz, atau lebih memiliki semangat yang serupa, dibandingkan Max Weber.

⁹²*Ibid.*

⁹³Sejarah singkat dan pemikiran Talcott Parsons, lihat Peter Beilharz (ed.), *Teori-teori Sosial*, hlm. 291-315.

BAB III

DIMENSI SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI DALAM PERKEMBANGAN LKS DI INGGRIS

A. Dimensi Sosial Politik Islam di Inggris

Dari berbagai literatur terdapat dua aspek penting dalam dimensi sosial-politik Islam di Inggris maka dapat dilacak pada sejarah perkembangan masyarakat Islam di Inggris, sehingga tercipta berbagai peradaban masyarakat Inggris termasuk dalam pembangunan ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah.

1. Sejarah Islam Masuk di Inggris

Sejarah Islam masuk di Inggris terjadi pada abad XVI-XVII pada saat kekuatan armada laut muslim sangat mendominasi laut Mediterranean. Pada saat itu, ekspansi kekuatan politik dan masyarakat muslim telah mencapai Istanbul sebagai pusat imperium Turki Usmani, Aleppo (Suriah) sebagai jalur penting yang dilalui silk road, Beirut (Libanon) sebagai pelabuhan besar yang disinggahi kapal-kapal Eropa, Jerusalem (Israel/Palestina) sebagai kota yang banyak diminati para peziarah, Kairo (Mesir) sebagai kota pusat perdagangan, dan Fez sebagai kota yang sangat maju dan terkenal pada saat itu.¹

Ketika armada Spanyol dipandang sebagai ancaman yang menghantui Inggris, Ratu Elizabeth pada pertengahan tahun 1580 tidak ragu-ragu untuk meminta Sultan Murad (penguasa Turki Usmani) membantu armada laut Inggris melawan orang-orang Spanyol.

Perkembangan kemajuan sosial di Inggris semakin mudah juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintahan Inggris yang lebih menyukai

¹Kota Islam (Online), *Sejarah Perkembangan Islam di Inggris*, lebih lengkap data dapat diakses di <http://kota-islam.blogspot.com/2014/02/sejarah-masuk-islam-di-inggris.html>

menjalin hubungan perdagangan secara luas dengan negeri-negeri muslim, dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain.

Dukungan politik yang mudah didapatkan oleh masyarakat di Inggris, juga dapat dikaitkan dengan rentang sejarah permulaan agama Islam yang dipeluk oleh beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan.

Dari beberapa literatur (seperti dalam *The Voyage Made to Tripoli*, 1583) adalah disebutkan, orang Inggris asli yang pertama kali memeluk Islam bernama John Nelson adalah putera perwira rendah anggota pasukan pengawal Ratu Inggris.

Juga, Raja Inggris Charles I telah mengoleksi manuskrip-manuskrip yang berbahasa Arab dan Persia. Perpustakaan Bodleian di Oxford memiliki manuskrip surat al-Walid (Sultan Maroko) yang ditujukan kepada Raja Charles I.

Kekacauan perang sipil mungkin menjadi pendorong beberapa orang Inggris untuk memutuskan hubungan tradisi yang baik, sehingga sebuah catatan yang dibuat tahun 1641 dengan mengacu kepada sebutan “sebuah sekte penganut Muhammad” (*a sect of Mahomatens*) dinyatakan “telah ditemukan di sini, di London”.

Pada sekitar tahun 1646 Raja Charles I diasingkan ke Oxford setelah dikepung oleh angkatan bersenjata pimpinan Cromwell. Pertempuran terburuk pecah dan berakhir pada kekalahan pasukan yang setia kepada raja.

Pada bulan Desember 1648, Dewan Mechanics dari New Commonwealth menyuarkan sebuah toleransi bagi berbagai kelompok agama termasuk Muslim.

2. Dukungan Politik dalam Perkembangan Islam di Inggris

Momen terbaik perkembangan sosial muslim di Inggris terjadi pada tahun 1649, pada saat al-Quran untuk pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa

Inggris oleh Alexander Ross dan kemudian dicetak secara umum dan direspon positif oleh masyarakat sampai sampai menghasilkan edisi kedua. Fakta ini membuktikan bahwa terjemahan Al-Quran mengalami jangkauan sirkulasi yang luas di kalangan masyarakat Inggris.

Ketika Cromwell menjadi penguasa tunggal Inggris di tahun 1649, acuan kepada Islam dan kaum muslim menjadi bagian dari diskusi yang sering diperbincangkan dalam konteks politik adalah positif, namun dari pandangan lawan politik Cromwell dianggap kebijakan negatif.

Musuh-musuh Cromwell menyerang kaum revolusioner karena mereka tidak menaruh respek kepada para pendeta dan menolak ajaran dan pendapat resmi petinggi Gereja Anglikan. Musuh-musuh Cromwell mencemooh dengan mengatakan, “Sungguh, jika pengikut-pengikut Kristiani mau bahkan rajin membaca dan mengamati hukum dan sejarah Muhammad, mereka boleh jadi merasa malu ketika melihat betapa tekun dan bersemangat para pengikut Muhammad dalam mengerjakan ketaatan kewajiban, kesalehan dan amal ibadah; betapa tulus ikhlas, suci dan takzimnya di dalam masjid, begitu taat kepada para ulama. Bahkan orang Turki terhormat sekalipun tidak akan mencoba melakukan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan muftinya.”

Kaum revolusioner dikritik karena mereka hanya mengikuti otoritas-otoritas keagamaan yang dideklarasikan oleh mereka sendiri. Sementara, sultan sekalipun sangat memperhatikan nasihat-nasihat mufti dalam persoalan keagamaan.

Penulis-penulis lain yang tidak menaruh simpati kepada revolusi Cromwell membandingkan para profesor agama orang-orang Turki dengan kaum puritan Cromwell.

Politik kekuatan Cromwell menjadi momentum hebat, karena di kalangan orang dekat Cromwell terdapat orang-orang berpengaruh seperti Henry Stubbe, sarjana ahli bahasa Latin, Yunani, dan Hebrew, dan terdapat pula sahabat Cromwell yang lain, Pocock, seorang profesor yang ahli bahasa Arab di Oxford.

Cromwell dan sekretarisnya, John Milton, menunjukkan keakrabannya kepada al-Qur'an. Hal itu tergambar dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada penguasa Muslim Al-Jazair di bulan Juni 1656. Dalam suratnya Cromwell menyatakan: "Cromwell mengharapkan pihak yang dikirimi surat agar mematuhi persetujuan dagang antara kedua negara karena tabiat agama Islam adalah 'kami sekarang, pada saat ini, merasa perlu untuk menyukai Anda yang telah memaklumkan diri Anda sendiri sampai saat ini dalam segala hal untuk menjadi orang yang mencintai kebenaran, membenci kebatilan, mematuhi amanah dalam perjanjian.' Kata-kata terakhir menegaskan deskripsi yang tepat mengenai Islam sebagai sebuah agama yang mengajak kepada kebenaran dan menanggalkan perbuatan batil." Cromwell banyak mengutip teks-teks al-Quran dalam berkomunikasi melalui surat. Tidak hanya ditujukan kepada kaum Muslim di seberang lautan, tetapi juga orang-orang Kristen yang tinggal di England dan kepulauan Inggris selebihnya.

Ilmuwan dari Universitas Cambridge, Isaac Newton, tercatat sebagai orang sangat dipengaruhi oleh pemikiran sarjana Muslim Arab. Pada tahun 1674, dengan penuh resiko dan keberanian menolak untuk berpegang pada ajaran suci trinitas. Michael White, penulis biografi Newton menyatakan, Newton secara fanatik menentang konsep trinitas.

Pada abad XVII teks-teks berbahasa Arab dalam bidang matematika, astronomi, kimia dan kedokteran merupakan tema sentral bagi program

pendidikan yang lebih tinggi di Inggris. Untuk memperoleh akses kepada pengetahuan lebih lanjut pada saat itu, bukan hanya penerjemahan yang dimulai di Oxford dan Cambridge, tetapi juga persiapan untuk melatih sebuah generasi sarjana yang ahli berbahasa Arab. Seorang pengunjung di Westminster School mencatat dalam buku hariannya, “Saya mendengar dan melihat sejenis latihan pada pemilihan para sarjana di Westminster School untuk dikirim ke Universitas, baik yang berbahasa Latin, Yunani, Hebrew maupun Arab.

Pada tahun 1636 telah dibuka jurusan bahasa Arab pada Universitas Oxford. Kemampuan linguistik sangat penting karena menurut Isaac Borrow, profesor matematika Cambridge, penguasaan bahasa Arab perlu untuk penguasaan lebih lanjut pengetahuan-pengetahuan tersebut. Para tokoh intelektual Muslim yang kenamaan dikenal dengan nama-nama mereka yang sudah “berbau” Inggris: Alfarabi, Algazel, Abensina, Abenrusd, Abulfeda, Abdiphaker, Almanzor, Alhazen. Water Salmon termasuk di antara mereka yang menyusun ilmu fisika praktis (1692) dari ‘Geber Arab’, atau ahli kimia, Jabir bin Hayyan. Robert Boyle (ahli kimia yang dikenal oleh setiap siswa sekolah) mempelajari sains dari literatur berbahasa Arab dengan tujuan agar mampu menghadapi tantangan dari konsepsi tradisional dalam pengetahuan kontemporer. Newton mewariskan lebih dari sejuta kata dalam subyek kimia dengan kata-kata asli berbahasa Arab.

3. Islam Menjadi Peradaban di Inggris

Imigrasi muslim ke Inggris mulai berlangsung pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 melalui pendaratan para pelaut yang direkrut oleh East India Company (Perusahaan India Timur) dari Yaman, dan Gujarrat.

Saat awal imigran muslim India dan Pakistan menetap di Inggris, pengaruh warisan kultural kerajaan dan struktur politik negara setempat yang saling mendukung memperkuat dorongan negara komunalisme. Selama hampir satu abad, umat Islam harus belajar hidup dengan status minoritas dan jauh dari kekuasaan politik di anak benua India, masyarakat Inggris pasca perang memberi ruang bagi identitas kebangsaan yang paralel.

Setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan sejalan dengan meluasnya ekspansi kolonial Inggris, para pendatang muslim itu semakin lama semakin banyak dan mulai membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, Shout Shields (dekat Newcastle), London, dan Liverpool. Komunitas muslim di negara itu memiliki akar budaya yang berbeda satu sama lain.

M. Ali Kettani, dalam bukunya *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* mengatakan imigran pertama ke Inggris adalah orang Yaman dari Aden. Mereka menghimpun diri di Cardiff dan di situ membangun salah satu masjid pertama di negeri itu pada tahun 1870. Sebelum pergantian abad, datang kelompok muslim lain dari India dan menetap di dekat London, di sana mereka membangun masjid Shah Jehan di Woking.

Sekitar abad ke-19, sejumlah pengusaha muslim juga telah berniaga ke kerajaan Inggris. Salah satunya adalah perusahaan terkenal **Mohamed's Baths** yang didirikan oleh Sake Deen Muhamed (1750-1851). Selain pekerja dan pedagang, pada akhir abad ke-19 mulai masuk juga kelompok intelektual ke Inggris. Hal ini terlihat tatkala pada periode antara 1893 hingga 1908, sebuah jurnal mingguan bernuansa Islami dengan nama "The Crescent", mulai disebar di Liverpool. Pendiri jurnal ini adalah seorang muslim keturunan bangsawan

Inggris yang bernama William Henry Quilliam, yang ditengah komunitas muslim dikenal sebagai Syekh Abdullah Quilliam, yang berprofesi sebagai pengacara. Dia masuk Islam pada tahun 1887 setelah lama bermukim di Aljazair dan Maroko. William Henry Quilliam (Syekh Abdullah Quilliam) bahkan memelopori pembangunan sebuah masjid yang sangat aktif dan menjadi pusat dakwah di wilayah Inggris.

Pada tahun 1930-an, gagasan rencana pembangunan masjid pusat di London juga muncul sebagai respons atas pembangunan masjid di Paris pada tahun 1926 yang juga mendapat perhatian dari Raja George IV pada tahun 1944. Namun, berbagai kendala seperti Perang Dunia II dan masalah yang dihadapi pemerintah Inggris akibat kemerdekaan India dan Pakistan, menyebabkan pembangunan masjid tertunda hingga tahun 1970-an.

Momentum pembangunan masjid yang kemudian berdampak besar pada peradaban Islam di Inggris adalah pada tahun 1977, ketika Masjid Pusat London dengan Islamic Cultural Center (Pusat Kebudayaan Islam)-nya akhirnya diresmikan dan dewasa ini menjadi terkenal.

Pertambahan jumlah masjid dalam perkembangan selanjutnya di Inggris sesungguhnya mencerminkan peningkatan jumlah komunitas muslim di Inggris. Peningkatan itu berhubungan erat dengan tahapan sejarah imigrasi kaum muslim secara besar-besaran dari berbagai negeri muslim ke Inggris tahun 1950-an, dan sebagai akibat penyatuan kembali keluarga imigran yang diterapkan awal tahun 1960-an, terutama dari India, Pakistan, dan Bangladesh.

Pengesahan *Commonwealth Immigration Act* (Undang-undang Imigrasi Persemakmuran) tahun 1962, juga semakin memberikan kemudahan untuk

menjadi warga negara Inggris bagi warga negara bekas jajahan Inggris sangat mempengaruhi atau mendorong laju migrasi.

Berikut ini pola distribusi pemukiman muslim berdasarkan pada geografis maupun etnis atau asal migran.

Tabel 3.1
Konsentrasi penduduk muslim di Inggris berdasar etnis dan kota

No	Etnis	Kota Konsentrasi
1	India	West Midlands
2	Arab dan Iran	Cardif, Liverpool, dan Birmingham
3	Turki-Cyprus	Timur London
4	Pakistan dan Bangladesh	Bradford (Islamabadnya Inggris)

Adapun dari perspektif mazhab, muslim di Inggris mayoritas bermazhab Hanafi, sisanya Syafi'i, Ja'fari atau Ismaili. Fahaman Hanafi memberikan aspek psikologis pemikiran masyarakat muslim di Inggris lebih rasional dan terbuka dan tidak tradisional.

B. Perkembangan Masyarakat Muslim di Beberapa Kota di Inggris

Dalam bagian ini akan dideskripsikan beberapa pengalaman seseorang dan tulisan tentang perkembangan masyarakat muslim di Inggris dan ekonomi.

Islam di Luton

Luton adalah sebuah kota kecil yang terletak tidak terlalu jauh dari London (sekitar setengah jam perjalanan dengan kereta). Suasana Islami sangat terasa di kota kecil ini: mulai dari toko makanan halal yang tersebar dimana-mana, perempuan berjilbab dan berniqob yang berlalu-lalang, hingga beberapa bangunan masjid yang berdiri di beberapa sudut kota.

Di kota ini pulalah diadakan *winter conference* yang berjudul “**The Return of Jihad and Khilafah: The Correct Understanding**”. Para peserta

konferensi saling mengucapkan salam, melempar senyum, berbagi, dan beramah tamah satu sama lain, dengan tidak membedakan suku bangsa, warna kulit, usia, dan status sosial. Konferensi ini diikuti oleh orang-orang kulit putih, coklat, dan hitam. Diikuti oleh orang-orang dari berbagai negara dari berbagai benua. Oleh tua dan muda.²

Konferensi berlangsung pada 31 Desember 2014 hingga 2 Januari 2015. Pada malam pergantian tahun baru, saya tidak melihat sedikit pun adanya ketertarikan dari para peserta konferensi yang menginap di tempat yang sama dengan saya untuk merayakan tahun baru, atau sekedar melihat bumbungan kembang api yang terjadi di luar sana. Konferensi ini juga ternyata mendapat penentangan yang keras dari English Defence League (EDL). EDL mengajukan izin untuk melakukan demonstrasi di sekitar lokasi konferensi dengan alasan acara ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kebencian dan memantik ekstrimisme. Namun, polisi lokal tidak memberikan izin demonstrasi tersebut karena tidak melihat adanya potensi untuk terjadinya apa yang dikhawatirkan oleh EDL. Polisi lokal hanya membolehkan demonstrasi jika dilakukan di pinggiran kota.

Islam di Birmingham

Birmingham, bersama London, menempati posisi teratas dalam peringkat kota-kota di Inggris dengan jumlah muslim terbesar. Sudah banyak cerita yang tersebar di berbagai media tentang kuatnya nuansa Islam di kota ini. Dan ternyata hal tersebut memang benar adanya. Ketika kali pertama saya turun dari bus yang mengantarkan saya ke kota ini, saya langsung melihat para perempuan berjilbab yang berlalu lalang di tengah kota. Bahkan tak sedikit juga yang menggunakan niqob/cadar. Di atas itu semua, bagi saya yang paling menarik terkait cerita Islam

² Muhammad Rezki Hr. *Islam Di Inggris*, 8 February 2015, <http://muslim.or.id/jejak-islam/islam-di-inggris.html>.

di kota ini adalah keberadaan Green Lane Masjid. Sebuah masjid yang juga dikelola oleh Salafiyin di kota ini, yang menjadi garda terdepan dalam dakwah Islam di Inggris. Para ulama dari timur tengah secara rutin hadir untuk memberikan pelajaran di masjid ini. Hampir setiap hari di masjid ini juga terdapat pengajian yang diisi oleh ustadz-ustadz lokal. Masjid ini juga dikelilingi oleh kawasan yang terasa sangat Islami, mulai dari toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan seorang muslim, hingga toko-toko yang menjual referensi-referensi Islam berbahasa Arab (kitab kuning).

Islam di Newcastle

Nuansa Islam di kota tempat saya tinggal ini memang tidak sekuat dua kota yang telah saya ceritakan sebelumnya. Namun, berbagai aktifitas dan perkembangan dakwah Islam di kota ini sangat patut untuk membuat bahagia.

Di Newcastle terdapat beberapa buah masjid dan di antara yang terbesar adalah Newcastle Central Mosque. Di masjid inilah terdapat semacam Islamic school untuk anak-anak penduduk lokal atau pun pendatang. Jika melaksanakan shalat ashar/magrib di masjid ini, saya sering mendapati anak-anak tersebut bersama-sama mengulang hafalan surat-surat pendek mereka. Di masjid ini pula diadakan kegiatan pengenalan Islam. Pengurus masjid secara rutin mengundang masyarakat yang tinggal di Newcastle untuk mendengarkan penjelasan mengenai konsepsi Islam yang sebenarnya. Acara tersebut biasanya sengaja diadakan bertepatan dengan waktu solat Isya', agar para peserta bisa mendengarkan azan dan melihat aktifitas ibadah shalat. Sebelum acara berakhir, peserta biasanya diminta untuk menuliskan kesan-kesan tentang apa yang telah mereka dengar dan lihat. Saya agak terkejut, ternyata respon yang diberikan sangat positif. Di antara komentar tertulis yang paling saya ingat adalah: "aku sangat suka mendengar

bacaan al-Quran. Lain kali jika diundang lagi, aku akan mengajak seluruh keluargaku!”

Masjid lainnya di Newcastle yang cukup besar adalah masjid yang disediakan oleh pihak Newcastle University, yang sekaligus menjadi kantor bagi Islamic Society (ISOC) dari Newcastle University. Peran Isoc dalam mendakwahkan Islam di kota ini, terkhusus di kampus, juga sangat signifikan. Agenda tahunan Isoc yang sudah menjadi sarana hidayah bagi banyak orang untuk berislam adalah Discover Islam Week. Di masjid ini pula secara rutin dilakukan pengenalan konsep Islam kepada anak-anak sekolah dan guru-guru mereka. Anak-anak dan guru-guru ini biasa diundang untuk datang ke masjid untuk diberi penjelasan tentang apa itu Islam dan melihat secara langsung bagaimana muslim melakukan solat zuhur/ashar.

Selain itu terdapat pula Islamic Diversity Centre (IDC) yang biasa melakukan dakwah dengan cara-cara kreatif. Pada musim dingin ini, IDC mengadakan event untuk mendakwahi para orang tua di panti jompo yang sudah tidak terlalu dipedulikan lagi oleh anak-anak mereka. Melalui event-event seperti ini, tidak sedikit orang yang menjadi tertarik untuk memeluk Islam.

IAIN PURWOKERTO

Briton dan Islam

Penduduk pribumi Inggris (Briton/British) terkenal sebagai orang yang ramah, santun, dan berbudaya. Saya pribadi sering mendapatkan perlakuan yang santun dan ramah tersebut ketika berinteraksi dengan mereka.

Orang Inggris juga sangat menghargai hak-hak individu, termasuk hak untuk beragama dan beribadah. Ketika mengikuti konferensi di Luton, Syaikh Abdul Haqq Turkamani yang sudah beberapa tahun tinggal di Inggris, bertanya kepada para peserta: “selama tinggal di negeri ini, pernahkah kalian diganggu

karena alasan agama? bukan karena alasan-alasan pribadi.” Maka banyak peserta konferensi yang menjawab tidak pernah, karena memang pemerintah Inggris sangat menjamin hak-hak untuk beragama (sebagaimana juga menjamin hak untuk tidak beragama). Apabila ada tindakan dari seseorang yang mengganggu hak untuk beragama tersebut, maka pihak yang berwenang akan memprosesnya secara hukum.

D. Perkembangan Islam di Inggris dalam segi sosial Budaya

Di Inggris agama Islam berkembang dengan pesat, merupakan dampak dari pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Terdapat satu tokoh yang sangat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam, dengan mengganti namanya menjadi Pekus Al-Ponsi, dan beliau menjadi dokter istana Raja Henry I. Pengembangan Islam dilakukan tiap hari libur, seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Dari segi kuantitas perkembangan Islam di Inggris dapat dilihat pada hasil penelitian menunjukkan terdapat **14.200 mualaf berkulit putih**, yang datang dari kalangan bangsawan, pejabat sampai selebritis. Mereka memeluk Islam oleh karena merasa gersangnya nilai-nilai kehidupan di Barat. Perkembangan Islam di negeri ini sangat pesat dirasakan sebelum terjadinya Tragedi 11 September.

Adapun dari segi kualitas, kaum muslim di Inggris tidak banyak mendapatkan kesulitan yang berarti tatkala berusaha mengimplementasikan keberagamaannya. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah Inggris yang secara tegas membebaskan seluruh warganya untuk memeluk dan menjalankan

ajaran-ajaran agamanya. Artinya, setiap warga negara Inggris tidak dibatasi dan dilarang untuk memeluk suatu agama apa pun.

Perkembangan muslim yang positif di Inggris juga merambah di kampus-kampus di Inggris. Banyak kegiatan yang dilakukan yang sifatnya dalam bentuk mimbar bebas, bahkan mereka juga aktif mengikuti kegiatan nasional. Kegiatan sosial budaya Islam di kampus-kampus juga ada hubungannya dengan kompetisi diantara mahasiswa untuk menempati posisi penting di Student Union (Senat Mahasiswa). Kemungkinan lain lagi, banyak mahasiswa dari negeri muslim, Malaysia, Libya, Iran, Turki, Saudi, Palestina, dan negara lainnya yang kuliah di Inggris. Disamping organisasi-organisasi keagamaan muslim dan organisasi Islam yang tumbuh di kampus, juga ada beberapa organisasi-organisasi Islam lain yang banyak berperan mensosialisasikan Islam melalui gerakan dakwah dan kampanye budaya yang menarik bagi rakyat Inggris tentang Islam, sehingga banyak penduduk pribumi Inggris yang tertarik memeluk Islam, di antaranya yaitu:

1. The Islamic council of Europe (Majlis Islam Eropa) berfungsi sebagai pengawas Kebudayaan Eropa.
2. The Union of Moslem Organization (Persatuan Organisasi Islam Inggris)
3. The Asociation of British Moslems (Perhimpunan Muslim Inggris)
4. Islamic Fondation dan Moslem Institute.

Perkembangan Islam di Inggris cukup mendapat apresiasi dalam hal kehidupan sosial budaya di Inggris yang mayoritas non muslim tidak terlepas oleh karakteristik ajaran Islam yang sangat toleran, inklusif, dan sangat menghargai hak-hak kemanusiaan. Maka wajar jika pangeran Charles, putra mahkota Inggris

mengungkapkan apresiasinya bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam Islam akan mampu menyelamatkan dunia.³

London Muslim Centre, Whitechapel

An 8,500m² new build for the East London Mosque in Whitechapel with a construction budget of £10M. As architects from RIBA Stage C-L under D&B procurement we were appointed direct to the contractor throughout. The new building provides two large community halls, 2 floors of educational facilities, a library, visitors accommodation and a business centre.

Perkembangan Masjid di Inggris

Di Inggris, masjid-masjid yang telah berdiri memang tidak semuanya dibangun dari nol atau dari tanah kosong, tetapi dibangun dari tempat ibadah agama lain. Karena kedatangan warga muslim, maka diubahlah tempat ibadah itu menjadi masjid.⁴

Seperti kebanyakan negara barat lainnya, seiring dengan banyaknya orang Islam keturunan ataupun pendatang dan juga bertambahnya populasi umat Islam di daerah tersebut, sehingga sejumlah gereja yang ditinggal oleh umat kristiani dialihfungsikan menjadi masjid.

Berikut adalah bangunan yang dulunya adalah gereja di sejumlah kota di Inggris yang saat ini telah berubah menjadi Masjid.

³Ajid. Thohir, *Perkembangan Peradapan Di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

⁴*Islampos (online)*, “Ketika Gereja-Gereja Di Inggris Berubah Menjadi Masjid Megah”, Kamis 5 Syawal 1433 / 23 Agustus 2012.

Brick Lane Mosque, London

Gambar
Brent of Mosque di London



Brent of Mosque atau Masjid Brick Lane merupakan nama posisi masjid yang berada di Brick Lane 52, Chichele Road, London NW2. Awalnya, bangunan itu merupakan gereja. Pada saat menjadi masjid, ciri bentuknya tidak banyak berubah, hanya ditambah kubah kecil berwarna hijau di beberapa bagian bangunan dan puncak menara.

Bangunan berdinding bata merah itu, merupakan masjid terbesar di London, yang mampu menampung 4.000 jama'ah, dan dipimpin oleh Syeikh Muhammad Sadeez. Walau demikian luas, masjid ini belum bisa menampung seluruh anggota jama'ah shalat Jumat, hingga sering kali jama'ah meluber ke jalan raya. Mayoritas anggota jama'ah merupakan keturunan Banglades, hingga wilayah tersebut disebut Banglatow.

Masjid Brick Lane memiliki sejarah yang sangat unik dan panjang. Awalnya, bangunan yang didirikan sejak tahun 1743 ini adalah gereja Protestan. Dibangun oleh komunitas Huguenot, atau para pemeluk Protestan yang lari dari Prancis untuk menghindari kekejaman penganut Katolik. Akan tetapi, karena jama'ahnya menurun, maka gereja ini dijual.

Di tahun 1809, bangunan ini digunakan masyarakat London untuk mempromosikan Kristen kepada para pemeluk Yahudi, dengan cara mengajarkan Kristen dengan akar ajaran Yahudi. Tapi, program ini juga gagal. Dan bangunan diambil oleh komunitas Metodis pada tahun 1819. Komunitas Metodis cukup lama “memegang” gereja ini. Walau demikian, pada tahun 1897, tempat ini diambil oleh komunitas Ortodok Independen dan berbagi dengan Federasi Sinagog yang menempati lantai dua.

Tapi tahun 1960-an komunitas Yahudi menyusut, karena mereka pindah ke wilayah utara London, seperti Golders Green dan Hendon, sehingga bangunan ditutup sementara, dan hal itu berlanjut hingga tahun 1976. Setelah itu gedung itu dibuka kembali, dengan nama barunya, Masjid Jami' London.

Masjid Zakariyya, Bolton



Masjid Zakariyya terletak di Peace Street 20 Bolton. Masjid yang berkubah lengkap dengan menara. Masjid Zakariyya ramai dikunjungi warga Bolton, terutama yang memeluk Islam, dan datang ribuan umat Islam untuk sholat Jum'at di Masjid Zakariyya.

Masjid Zakariyya merupakan perjuangan umat Islam umat Islam Bolton dan Balckburn yang dari tahun 1965 hingga 1967 belum memiliki tempat permanen untuk melaksanakan shalat. Bahkan untuk melakukan shalat Jumat, mereka melaksanakannya di The Aspinal, sebuah diskotik dan tempat dansa yang digunakan di malam hari, sedang siangnya di hari Jumat tempat itu dibersihkan para relawan guna dijadikan sebagai tempat melaksanakan shalat Jumat.

Karena jumlah jama'ah semakin bertambah, maka diperlukan tempat besar yang permanen. Kemudian dimulai pencarian bangunan yang dapat digunakan sebagai masjid sekaligus *Islamic Center*.

Pada tahun 1967, terdapat penawaran pembelian gedung bekas gereja komunitas Metodis, yang terpaksa dijual karena terbakar. Dengan dana sebesar 2.750 poundsterling dari komunitas muslim lokal, akhirnya bangunan itu menjadi milik umat Islam, dan diberi nama Masjid Zakariyya.

Masjid Didsbury, Manchester



Masjid Didsbury terletak di Burton Road, Didsbury Barat, Manchester. Gedung Didsbury merupakan gedung bekas gereja komunitas

Metodis, yang bernama Albert Park. Gedung ini tergolong bangunan kuno, karena telah beroperasi **sejak tahun 1883**.

Pada tahun 1962 gereja Albert Park ditutup, dan beralih menjadi masjid dan *Islamic Center*. Masjid Didsbury mampu menampung 1.000 jama'ah, dan yang bertanggung jawab sebagai imam dan khatib hingga kini adalah Syaikh Salim As Syaikh.

Masjid New Peckham, London

Didirikan oleh Syaikh Nadzim Al Kibrisi. Terletak di dekat Burgess Park, tepatnya di London Selatan SE5. Kini masjid ini berada di bawah pengawasan Imam Muharrim Atlig dan Imam Hasan Bashri. Sebelumnya, gedung masjid ini merupakan bekas gereja St Marks Cathedral.

Masjid Sentral Wembley



Masjid ini terletak di jantung kota Wembley, dekat dengan Wembley Park Station. Daerah ini memiliki komunitas muslim besar dan banyak toko Muslim yang berada di sekitarnya. Gedung masjid ini sebelumnya juga merupakan bekas gereja. Walau sudah terpasang kubah di puncak menaranya, tapi kekhasan

bangunan gereja masih nampak jelas. Dengan demikian, siapa saja yang melihatnya, akan mengetahui bahwa bangunan itu dulunya adalah gereja.

Masjid Jami, Essex



Masjid Jami' Essex merupakan gedung bekas gereja yang sangat bersejarah di **Southend**. Namungedung bekas gereja tersebut dibeli oleh komunitas muslim dengan harga 850 ribu pound sterling, yang kemudian dialihfungsikan menjadi Masjid Jami' Essex. Dari aspek fisik, tidak banyak dilakukan perubahan pada bentuk bangunan dari gereja ke masjid. Apalagi bangunan tersebut telah berumur 100 tahun lebih, hanya perlu menambah tempat untuk berwudhu dan sebuah menara.

Gereja dijual, karena jama'ah berkurang, sehingga kegiatan peribadatan umat kristendipusatkan di Bournemouth Park Road dengan konsekuensinya, gereja ini tidak beroperasi sejak tahun 2006. Rancananya gereja akan dijadikan apartemen, tapi gagasan tersebut ditolak oleh Dewan Southend. Akhirnya, gereja kosong itu dibeli oleh komunitas muslim yang tinggal di kota Southend, yang juga sedang membutuhkan tempat untuk melaksanakan ibadah.

Masjid Jami' Essex tidak terlalu besar dan tidak banyak menampung jama'ah, namun tidak menjadi persoalan, karena umat muslim di Southend relatif masih sedikit, sehingga “gereja bekas” itu merupakan tempat yang sesuai dan mampu menampung 300 jamaah.

E. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Inggris

Sebuah studi mencatat Inggris sebagai negara yang memiliki bank terbanyak bagi umat muslim di antara negara Barat lainnya. Di Inggris telah berdiri The Islamic Bank of Britain (IBB)/2004, European Islamic Investment Bank (EIIB)/2005, The Bank of London and The Middle East (BLME)/2007, Qatar Islamic Bank UK (QIBUK), European Finance House, Gatehouse/2008, serta Abu Dhabi Islamic Bank UK (ADIB-UK)/2013. Terdapat pula 17 bank lainnya seperti Barclays, RBS, dan Lloyds Banking Group yang telah memiliki unit usaha syariah.⁵

Gambar
Karyawan Cham Bank London



⁵ *Republika (online)*, “Inggris Negara Barat dengan Bank Syariah Terbanyak”, Kamis, 12 Februari 2009, 04:48 WIB, (<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/02/12/3095-inggris-negara-barat-dengan-bank-syariah-terbanyak>)

Aset perbankan syariah Inggris mencapai 18 miliar dolar AS (12 miliar pounds) melebihi aset bank syariah seperti di Pakistan, Bangladesh, Turki, dan Mesir. Hal tersebut pun didukung oleh 55 universitas dan lembaga pendidikan lainnya di Inggris yang memiliki pendidikan keuangan syariah. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding negara-negara lainnya.

Berdasarkan laporan International Financial Services London (IFSL), perkembangan Inggris sebagai pusat keuangan Islam dalam beberapa tahun terakhir sangat didukung oleh pemerintah. Dukungan pemerintah diantaranya adalah kekeluasaan pajak bagi kredit rumah dan membuat perdagangan sukuk menjadi lebih mudah.

Direktur Ekonomi IFSL, Duncan McKenzie, mengatakan dukungan kebijakan pemerintah Inggris akan keuangan Islam menempatkan pelayanan syariah seperti layanan konvensional. "Perkembangan keuangan syariah di Inggris menunjukkan negara ini satu-satunya negara Barat yang memegang teguh fitur keuangan Islam," kata McKenzie, sebagaimana dilansir dari telegraph.co.uk.

Inggris menduduki peringkat delapan dalam aset perbankan syariah di seluruh dunia. CEO UK Trade & Investment, Sir Andrew Cahn, mengatakan meski ekonomi syariah tak berasal dari Inggris, tapi keuangan syariah telah menemukan tempatnya di Inggris.⁶

⁶ *Republika (online)*, "Inggris Negara Barat dengan Bank Syariah Terbanyak", Kamis, 12 Februari 2009, 04:48 WIB, (<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/02/12/3095-inggris-negara-barat-dengan-bank-syariah-terbanyak>)

The Financial Services Authority (FSA), atau Otoritas Jasa Keuangan Inggris secara politik sangat mendorong terhadap perkembangan bank Islam dengan mengantisipasi tentang regulasi sistem keuangan Islam sejak tahun 2002. Sampai Mei 2008, Inggris masih menjadi satu-satunya negara yang mempunyai izin bank Islam di Eropa, dan London menjadi “gateway” pasar keuangan Islam di Eropa.⁷



⁷Christofer Engzell, *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan Lembaga Keuangan Islam (LKS) di Inggris sangat pesat karena dukungan politik yang bagus, terutama dari Perdana Menteri James Cameron yang dalam beberapa acara ekonomi Islam di Inggris terlibat langsung. Seperti dalam Forum Konferensi Ekonomi Islam Dunia pada tahun 2013.

Perkembangan LKS di negara dengan Islam sebagai minoritas seperti di Inggris, secara politik sangat baik dalam memberikan dinamika kebijakan nasional di Inggris. Oleh karenanya, pemerintah Inggris pun memberikan berbagai kebijakan, seperti penancangan London sebagai Gate Way bagi perkembangan LKS di Eropa.

Dari sisi sosial, perkembangan LKS memberikan citra peradaban muslim yang modern dan terbuka bagi seluruh manusia, tanpa ada pembeda dalam mengadaptasi berbagai kemajuan teknologi di bidang LKS.

Dari sisi ekonomi, perkembangan LKS memberikan citra kesejahteraan atas pelimpangan modal yang berasal dari masyarakat muslim. Walaupun beberapa bank yang beredar di Inggris merupakan ekspansi dari LKS yang berasal dari Timur Tengah.

2. Kemajuan Lembaga Keuangan Islam di Inggris merupakan dampak dari sejarah panjang perkembangan Islam di Inggris yang masuk sejak abad ke XVI-XVII pada saat kekuatan armada laut muslim sangat mendominasi laut

Mediterranean. Dan Islam telah menjadi bagian penting dalam peradaban Inggris, karena Islam tidak hanya sebagai bagian dari fakta sosial, tapi juga telah menjadi bagian dalam sistem pendidikan di beberapa perguruan tinggi di Inggris.

B. Saran

Dengan keterbatasan sumber dan informasi yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti meyakini bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Namun dilihat dari aspek ide dan gagasan, maka sangat menarik riset-riset yang mengambil tema perkembangan LKS di berbagai negara non muslim, terutama di Eropa dan Amerika. Hal ini sebagai alternatif akademik, di tengah negara-negara muslim di kawasan Timur Tengah yang menjadi nenek moyang perkembangan Islam, namun di era modern masih banyak terjadi perang dan kekacauan yang memakan banyak korban jiwa.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat, dan masukan kritik selalu peneliti harapkan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Drazen, *Political Economy in Macroeconomics*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000.
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University, 2005.
- Agus Sudibyo, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ahmed Belouafi dan Abdelkader Chachi, "Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development and Growth", *Jurnal Islamic Economic Studies*, IRTI, Volume. 22, No. 1, May, 2014.
- Ahmed Belouafi dan Abderrazak Belabes, "Islamic Finance In Europe: The Regulatory Challenge", *Islamic Economic Studies*, Vol. 17, No. 2, Januari, 2010.
- Albert Widjaja, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, terj.: Soeheba Kramadibrata, Jakarta: UI Press, 1986.
- Antonio Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, terj.: Soeheba Kramadibrata, Jakarta: UI Press, 1985.
- Aristoteles, *Politik (La Politica)*, terj.: Syamsul Irawan Kharie, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syathibi*, Jakarta: RajaGrafindo, 1996.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik* Jakarta: Grassindo, 2001.
- Christofer Engzell, "Islamic banks in the United Kingdom: Growth in the 21st century", Juni, 2008, *Uppsala University, Department of Economic History (online)*, <http://www.diva-portal.org>.
- Clarton Clymer Rodee, et.el., *Pengantar Ilmu Politik*, terj. Zulkifli Hamid, Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
- Clement M. Henry dan Rodney Wilson (ed.), *The Politics of Islamic Finance*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
- Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- David Easton, *The Political System*, New York: Alfred A. Knopf, 1971.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- F. Dale Eickelam, et.el., *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, terj.: Endi Haryono dan Rahmi Yunita, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Filippo di Mauro, et.el., "Islamic Finance in Europe", dalam *Occasional Paper Series*, Europe Central Bank, No. 146, Juni, 2013.
- Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, terj. Chusnul Murtafiin, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- George Riesman, *Capitalisme a Treatise of Economics*, Ottawa, Illinois: Jamason Books, 1990.
- George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred A. Knopf, 1961.
- Harold Lasswell, *Politics, Who gets What, When, How*, New York: World Publishing, 1950.
- Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- James A. Caporaso dan David P. Levine, *Theories of Political Economy*, USA: Cambridge University Press, 1992.
- Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Komarudidin Sastradipoera, *Uang: Di Negara Berkembang*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Lawrence C. Mayer, *Comparative Political Inquiry: A Methodological Survey*, Homewood, Illionis: The Dorsey Press, 1972.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2000.
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mastuhu dan Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Jakarta: Pusjarlit dan Nuansa, 1998.
- Metta Spencer dan Inkeles Alex, *Foundations of Modern Sociology*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1982.

- Michael Rush dan Philip Althoff, *Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terj.: Suherman Rosyidi, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Muhammad Baqr as-Sadr, *Iqtisaduna*, Beirut: Dar at-Ta'aruf Lilmatbu'at, 1401 H/1981 M.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mustak Ahmad, *Etika Bisnis*, terj.: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Ondrej Sramek, "Islamic Economic: New Economic Paradigm, or Political Agenda?", dalam *Jurnal New Perspectives on Political Economy*, Volume 5, No. 2, 2009.
- Peter Beilharz (ed.), *Teori-teori Sosial*, terj.: Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Rodney Wilson, "Islamic Finance in Europe", RSCAS Policy Papers, European University Institute, No. 02, 2007, (<http://www.eui.eu>), hlm. 2.
- Roger F. Soltau, *An Introduction to Politics*, London: Longmans, 1961.
- Sayed Taher (ed.), *Reading in Micro Economics*, Longman, Malaysia: Petaling Jaya, 1992.
- Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Penentu Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*, terj. Zahara D. Noer, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Syed Nawab Haedar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- TIM P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Walid Hejazi, "The potential for Islamic Finance in the West", (<http://www.irti.org/English/News/Documents/Seminars>).
- William Stanley Jevons, *The Theory of Political Economy*, London and New York: Macmillan and Co., 1871.